PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Secara eksternal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Masa Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, 14 Maret 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd.

H. ROMI HARIYANTO, SE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... v

I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. KELEMBAGAAN 12

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 20

D. ISSU-ISSU STARTEGIS..... 26

E. MAKSUD DAN TUJUAN..... 28

F. LANDASAN PENYUSUNAN..... 28

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2016..... 30

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 32

A. VISI DAN MISI 35

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 36

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 40

D. PERJANJIAN KINERJA..... 47

III. AKUNTABILITAS KINERJA 50

A. INDIKATOR KINERJA 50

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA 51

C. KINERJA KEUANGAN 73

IV. PENUTUP 78

A. SIMPULAN..... 78

B. SARAN..... 79

V. LAMPIRAN

LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN

LAMPIRAN III. PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN

LAMPIRAN IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN

LAMPIRAN V. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 merupakan LKjIP memasuki tahun ketiga dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021. LKjIP Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 melaporkan capaian kinerja *(Performance Results)* selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja *(Performance Plan)* Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021 dan APBD Tahun 2019.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 menetapkan 488 program dan 1.526 kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja dari 5 misi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021. masuk kedalam kategori sangat berhasil yakni 95,73% lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MISI KABUPATEN	RATA-RATA CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)
		2019
1	MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	106,22
2	MISI 2 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)	92,53
3	MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK	116,54
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF	50,00
5	MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS	113,33
RATA-RATA		95,73

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian indikator ekonomi adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2019 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.

4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayagunakan.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya "*good governance*" pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya "*good governance*". Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja

berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuiakan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km^2 dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha,sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km2 dan lautan/perairan seluas 3.560 Km2. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan

dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km2 dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km2 yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km^2	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478.17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	**20**	**73**	**5.445,00**	**100,00**

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya ditandai dengaan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 bertambah sebanyak 1.572 jiwa dari 218.413 jiwa pada tahun 2018 menjadi 219.985 jiwa pada tahun 2019 atau dengan pertumbuhan 0,72 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2019 sebesar 40,40 jiwa/km^2 dan sex ratio 105,35.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 dan 2019

No	Kecamatan	2018*					2019				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Mendahara	13.495	12.948	26.443	104,33	3,93	13.495	12.948	26.443	104,22	29,01
2	Mendahara Ulu	10.075	8.926	19.001	113,08	4,86	10.075	8.926	19.001	112,87	49,83
3	Geragai	12.460	10.975	23.435	113,76	4,16	12.460	10.975	23.435	113,53	82,13
4	Dendang	7.678	7.400	15.078	103,87	3,72	7.678	7.400	15.078	103,76	31,53
5	Muara Sabak Barat	9.280	8.812	18.092	105,51	4,41	9.280	8.812	18.092	105,31	71,86
6	Muara Sabak Timur	15.826	15.649	31.475	3,86	3,86	15.826	15.649	31.475	101,13	76,72
7	Kuala Jambi	7.480	7.275	14.755	4,21	4,21	7.480	7.275	14.755	102,82	122,43
8	Rantau Rasau	12.198	11.633	23.831	3,71	3,71	12.198	11.633	23.831	104,86	66,92
9	Berbak	5.088	4.851	9.939	3,58	3,58	5.088	4.851	9.939	104,43	51,11
10	Nipah Panjang	12.971	12.689	25.660	3,99	3,99	12.971	12.689	25.660	105,90	6,74
11	Sadu	6.314	5.962	12.276	106,02	4,04	6.314	5.962	12.276	105,90	6,74
Jumlah		**112.118**	**106.295**	**218.413**	**105,48**	**4,01**	**112.865**	**107.120**	**219.985**	**105,36**	**40,40**

**Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah*

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 mencapai 4,25 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,09 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Perumahan (Real Estat) sebesar 9,13 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya pertumbuhan yang negatif pada Kategori Industri Pengolahan tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Timur.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,11 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,57 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 9,39 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,09 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,83 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 6,78 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,05 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,62 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,02 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,53 persen, kategori Real Estate sebesar 4,17 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,62 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,23 persen, kategori industri Pengolahan sebesar 2,68 persen, serta kategori Konstruksi sebesar 2,66 persen.

Tabel 1.3.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,62	6,41	6,41	4,33	2,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0,42)	0,87	0,87	1,53	4,38
3.	Industri Pengolahan	2,68	1,08	1,93	4,44	0,2
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,09	5,07	2,05	4,68	2,9
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,53	5,11	2,64	7,24	7,24
6.	Konstruksi	2,66	6,54	13,32	6,22	7,11
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,11	12,61	7,2	7,37	7,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,62	7,74	6,17	5,7	4,86
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	10,27	10,54	8,11	2,46
10.	Informasi dan Komunikasi	6,05	9,91	7,69	9,46	7,69
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	8,95	5,4	1,24	3,85
12.	Real Estate	4,17	8,23	8,8	8,48	9,13
13.	Jasa Perusahaan	6,83	7,67	5,32	4,92	5,73
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,39	5,44	4,55	5,17	4,55
15.	Jasa Pendidikan	5,02	8,59	6,03	5,46	6,03
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,43	9,76	6,07	4,88	6,07
17.	Jasa lainnya	6,78	7,83	5,39	6,67	4,11
	Laju Pertumbuhan	**1,87**	**2,65**	**3,07**	**3,09**	**4,25**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi .

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengalami kenaikan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 dengan migas yaitu sebesar Rp. 18.659,68 miliar naik sebesar Rp. 2.381,6 miliar menjadi Rp. 21.041,3 miliar pada tahun 2017. Sedangkan PDRB atas dasar konstan dengan migas tahun 2017 sebesar Rp. 16.766,26 miliar meningkat sebesar Rp. 508,46 miliar dari tahun 2016 yang sebesar Rp.16.257,80 miliar. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp. 9.381,29 miliar pada tahun 2017, meningkat sebesar Rp. 919,29 miliar pada tahun 2016 yang sebesar Rp. 8.461,99 miliar. Untuk PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan yang pada tahun 2016 mencapai Rp.5.640,84 miliar meningkat sebesar Rp. 419,77 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 6.060,61 miliar.

5. Struktur Ekonomi

Peranan / kontribusi sektor lapangan usaha menunjukan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan kerja.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun saat ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor real estat sebesar 9,13 persen, urutan kedua tahun 2019 yaitu sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,69 persen, urutan ketiga yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebsesar 7,24 persen, urutan keempat yaitu sektor konstruksi sebesar 7,11 persen, urutan kelima yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,06 persen, urutan keenam yaitu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,07 persen, urutan ketujuh yaitu sektor Jasa Pendidikan sebesar 6,03%, urutan kedelapan yaiut sektor transportasi dan perdagangan sebesar 4,86 persen, urutan kesembilan yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,55 persen, urutan kesepuluh yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,38 persen, urutan kesebelas yaitu sektor Jasa lainnya sebesar 4,11 persen, urutan kedua belas yaitu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,85 persen, urutan ketiga belas yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebsear 2,83 persen, urutan keempat belas yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,46 persen, urutan kelima belas yaitu sektor Pengadaan listrik dan gas sebesar 2,09 persen dan urutak terakhir yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 0,2 persen. Laju pertumbuhan ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadao nilai PDRB.

6. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah,

namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2012 – 2017, namun jika dilihat pertumbuhan per tahun, ada perlambatan pada tahun 2015 (ADHB) sebesar 6,04 persen. Pada tahun 2017 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 97.064.393,00 naik sebesar 12 persen dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 86.661.835,00 begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatkan sebesar 2,43 persen tahun 2016 sehingga tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 77.343.370,00. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain uapaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya mengendalikan jumlah penduduk tetap diperlukan.

7. Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan. Tingkat inflasi Kota Jambi dari tahun 2017-2019 adalah berfluktuasi dengan rata-rata 2,32 persen per tahun. Pada tahun 2017, tingkat inflasi Kota Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 2,68 persen, tetapi pada tahun 2018 tingkat inflasi naik kembali menjadi 3,02 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, tingkat inflasi Kota Jambi menurun signifikan menjadi sebesar 1,27 persen. Inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga.

8. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar

antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang Pluktuatif cenderung stagnan. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup stabil. Indeks Gini pada tahun 2019 sebesar 0.29 sama pada tahun 2017. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak dari posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna.

B. KELEMBAGAAN

1. Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semulanya diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah,

kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah "*Miskin Struktur Kaya Fungsi*", maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18 Tahun 2014 menerapkan prinsip "*Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi*".

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

MATERI	PP No 18 Tahun 2016	PP No 41 Tahun 2007
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat; ▪ Dinas;	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat ▪ Lemtekda.

	▪ Badan; ▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota) ▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan : ❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi) ❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH ❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memebreikan layanan langsung kepada masyarakat. ❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung.	▪ Kecamatan (khsusus kab/kota) ❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor.
MATERI	**PP No 18 Tahun 2014**	**PP No 41 Tahun 2007**
TIPOLOGI	❖ Jumlah perangkat Derah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang. ❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelmpkkan menjadi : ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A. ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah tipe B ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang.	❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan. ❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah.
PEMETAAN URUSAN	❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung. ❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan	❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung. ❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.

JUMLAH PERANGKAT DAERAH	❖ Jumlah perangkat Derah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah. ❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4. ❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan. ❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah.	❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan. ❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7.

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagiandari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujud sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi "siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya". Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustaakan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
    2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:
   a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
   b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;
   c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
   d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
   e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
   f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
   g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
   h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
   i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
   j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
   k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah adalah:

a. Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di perdesaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah dalam pembangunannya. Terbatasnya APBD menjadi kendala dalam

pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan dimana konstruksi yang digunakan adalah struktur tiang beton bertulang yang memerlukan biaya tinggi. Hingga tahun 2017, masih terdapat ruas jalan sepanjang 88,02km dengan kondisi jalan rusak dan sepanjang 105,02 km dengan kondisi jalan rusak berat. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.

b. Belum optimalnya irigasi yang mengairi pada lahan tanaman pangan, dimana kondisi rehabilitasi irigasi mengalami kondisi pertumbuhan minus 42,72 persen di tahun 2017.
c. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik, hal ini didukung dengan data perbandingan jumlah dermaga kayu sebanyak 39 unit dan jumlah dermaga permanen sebanyak 33 unit pada tahun 2017.
d. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
e. Rasio kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mencapai angka 88,89 persen masih rendah dibandingkan rasio kelistrikan Provinsi Jambi da nasional yang sudah diatas angka 90 persen; dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih masih tergolong rendah dengan angka pertumbuhan 13,52 persen.
f. Belum adanya data daya dukung dan daya tampung lingkungan
g. Masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana karhutla yang menimbulkan asap.

2. Permasalahan Perekonomian Daerah;

a. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, dari sebanyak 28.300 jiwa pada tahun 2013 menjadi 27.220 jiwa di tahun 2017, akan tetapi masalah kemiskinan masih merupakan permasalahan kompleks yang harus memperoleh penanganan serius dalam menindaklanjutinya.

b. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena daya dukung infrastruktur terbatas.
c. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
d. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani dikarenakan harga hasil produksi pertanian lebih kecil dibandingkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Banyak program yang hanya dikhususkan untuk peningkatan produksi tetapi tidak dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
e. Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.
f. Masih adanya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan sawit.
g. Masih adanya infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi, sehingga sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
i. Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Even-even peribadatan apabila ini dikemas dan dipertunjukkan dengan tanpa mengurangi hakikat kereligiusannya, pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

a. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik yang perlu dilakukan perbaikan.

b. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid SD/sederajat pada tahun 2017 hanya sebesar 49,82 persen dan rasio guru terhadap murid SMP/sederajat hanya mencapai angka 54,25 persen di tahun 2017.
c. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut jenjang pendidikan SD/sederajat mencapai angka 98 persen dan untuk APM SMP/sederajat hanya 79,40 persen dimana kondisi ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
d. Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 mengalami peningkatan, kecuali jumlah dokter dan perawat yang mengalami penurunan (Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2018).
e. Perlunya peningkatan kompetensi keahlian tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat.
f. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, puskesmas dan puskemas pembantu masih perlu ditingkatkan.
g. Perlunya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga yang dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah.
h. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan daerah.

4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

a. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas.
b. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
c. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

d. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah yang berimbas kepada tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaanya, masih banyak ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain: masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari predikat akuntabilitas pada tahun 2018 masih pada level "CC". Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat memperoleh Opini WTP. Upaya ini membuahkan hasil sehingga pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk penilaian LKD Tahun 2018. WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga good and clean government dapat terwujud. Namun

demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka ada beberapa pokok persoalan pada tata kelola pemerintahan daerah yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya yaitu :

1. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada perangkat daerah masih rendah sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
2. Perlunya pengoptimalan dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam sistem pelayanan perizinan perlu ditingkatkan dengan efektif dan efisien.
4. Peningkatan peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui berbagai aplikasi dan teknologi yang terbaru.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam mentaati peraturan daerah sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi peraturan daerah.
6. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.
7. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena belum tergalinya potensi yang dari berbagai sektor yang dapat meningkatkan PAD oleh Badan Keuangan Daerah.
8. Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
9. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang akan menghasilkan capaian opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan.

D. ISSU-ISSU STRATEGIS

1. Issu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

a) Kondisi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

b) Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Issu Strategis Perekonomian Daerah

a) Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan.

b) Keberadaan UMKM dan koperasi belum dapat berperan signifikan dalam peningkatkan ekonomi masyarakat.

c) Potensi pariwisata daerah belum tergali dikarenakan terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

3. Issu Strategis terkait dengan peningkatan SDM

a) Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .

c) peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam aspek bidang kehidupan.

d) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparatur daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya daya saing.

4. Issu-issu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik

a) Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.

b) Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

5. Isu-issu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
2. Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

6. Isu-issu strategis Global, Nasional dan Regional

a) Letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis sangat strategis, karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

b) Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan serta SDGs. Dengan adanya Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut, Tahura, dapat dipastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sumber paru-paru dunia.

c) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan gas dan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d) Masih terdapat konflik sengketa lahan antara Penyelesaian Batas Kabupaten dan batas Desa dengan Taman Nasional Berbak merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2019.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
   c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
   d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
   g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   h. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
   j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.
   k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaarn 2019.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2019

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas konsidi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isue strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2019 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas

keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021 dan Rencana Kinerja 2019. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2019.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 mengakomodir beberapa perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan :

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :
   a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
   b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila :
   a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
   b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, tanggal 7 Februari 2019, merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2016. Disamping itu Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

Perubahan RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, Perubahan RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perubahan RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Perubahan RPJMD setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)"**. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

3. Delapan Pilar Utama

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK ;
5. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib ;
6. Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Pada dasarnya tidak ada perubahan tujuan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021. Perubahan jumlah tujuan dari sebelumnya berjumlah 21 tujuan menjadi 6 tujuan lebih disebabkan oleh penajaman kalimat tujuan serta penggabungan tujuan-tujuan yang dapat ditunjukkan dengan satu indikator menjadi satu. Adapun tujuan-tujuan yang mengalami penggabungan tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Penajaman dan Penggabungan Beberapa Tujuan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan peternakan	3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan

4. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	
5. Meningkatkan daya saing produksi perikanan	
6. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	
7. Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara	
8. Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	
9. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK
10. Meningkatkan sarana pendidikan dasar	
11. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	
13. Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi	
15. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	5. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib
16. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	

17. Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	
18. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	
19. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	6. Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah
20. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	
21. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW;
4. Mengurangi permukiman kumuh;
5. Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi;
6. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan;
7. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
8. Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis;
9. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;

10. Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan;
11. Meningkatnya investasi industri kecil menengah;
12. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan;
13. Pengembangan destinasi wisata;
14. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat;
15. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
16. Menekan laju pertumbuhan penduduk;
17. Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
18. Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya;
19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
20. Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa;
21. Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan;
22. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government;
23. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah :

a) Peningkatan jaringan dan kualitas jalan jembatan kabupaten;
b) Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat;

c) Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW kabupaten;
d) Perbaikan permukiman kumuh padat penduduk;
e) Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi layak pada masyarakat;
f) Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
g) Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi;
h) Peningkatan aksesibilitas orang dan barang melalui jalur air;
i) Peningkatan produksi tanaman pangan;
j) Peningkatan produksi daging;
k) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan;
l) Peningkatan pemasaran hasil pertanian;
m) Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat;
n) Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM;
o) Peningkatan usaha industri kecil dan menengah yang berdaya saing;
p) Peningkatan produksi perikanan (perairan umum,kolam dan air laut);
q) Peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan menarik;
r) Peningkatan mutu pendidikan dasar;
s) Peningkatan sarana pendidikan dasar;
t) Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat;
u) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
v) Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
w) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK;
x) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan;
y) Pengendalian kebijakan daerah;
z) Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
aa) Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang baik;

bb) Peningkatan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;

cc) Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government;

dd) Peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016 – 2021 adalah :

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.

c) Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 – 2025 juga

menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1) Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis;
2) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
3) Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian;
4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
5) Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh;
6) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
7) Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah;
8) Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas;
9) Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala;
10) Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan;
11) Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija;
12) Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan;
13) Pengembangan tanaman hortikultura;
14) Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian;
15) Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan;
16) Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan;
17) Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian;
18) Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
19) Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan;
20) Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM;
21) Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah;

22) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut;
23) Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan;
24) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
25) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
26) Menguatkan upaya kesehatan melalui pendekatan keluarga;
27) Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak;
28) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana;
29) Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja;
30) Meningkatkan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan;
31) Pemantauan kebijakan daerah;
32) Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
33) Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
34) Meningkatkan kemandirian desa;
35) Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
36) Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja;
37) Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP;
38) Meningkatkan kapabilitas internal audit;
39) Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2016 – 2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut ini:

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)			
TUJUAN		**SASARAN**	**STRATEGI**
MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan			
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap 2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	1. Peningkatan jaringan dan kualitas jalan jembatan kabupaten 2. Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat
		3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	3. Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW kabupaten
		4. Mengurangi permukiman kumuh	4. Perbaikan permukiman kumuh padat penduduk
		5. Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	5. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi layak pada masyarakat
		6. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	6. Pengendalian kualitas lingkungan hidup
2.	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	7. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	7. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi
			8. Peningkatan aksesibilitas orang dan barang melalui jalur air
MISI 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan			
3.	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan	8. Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	9. Peningkatan produktivitas tanaman pangan 10. Peningkatan produksi daging 11. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 12. Peningkatan pemasaran hasil pertanian
		9. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	13. Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat
		10. Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	14 Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM

		11. Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	15. Peningkatan usaha industri kecil dan menengah yang berdaya saing
		12. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan	16. Peningkatan produksi perikanan (perairan umum, kolam dan air laut)
		13. Pengembangan destinasi wisata	17. Peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik
MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK			
4.	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	14. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat	18. Peningkatan mutu pendidikan dasar 19. Peningkatan sarana pendidikan dasar 20. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
		15. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	21. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak
		16. Menekan laju pertumbuhan penduduk	22. Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah
		17. Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	23. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK
MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif			
5.	Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	18. Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	24. Peningkatan peran masyarakat dalam Pembangunan
		19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	25. Pengendalian Kebijakan Daerah 26. Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.272.034.541.903,57 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 578.065.062.233,38 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 693.969.479.670,19.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	61,29%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	36,00%
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4.	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,12%

5.	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	58,00%
		Persentase Sanitasi Layak	66,90%
6.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,1
7.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,35
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,04
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8.	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	100
9.	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	18,51%
10.	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	92,00%
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	113,37
12.	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,60%
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13.	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,12
14.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,06
15.	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
16.	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%
17.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	93,75
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
18.	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	89,04%
19.	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	315.000

20.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	86,00%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	45%
21.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	A
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, indikator kinerja masih bersifat parsial dan komulatif sehingga

pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2019 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

	MISI 1 : *MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*

Untuk mencapai Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** pada tahun 2019 telah dilaksanakan 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap
2) Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan
3) Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW
4) Mengurangi permukiman kumuh
5) Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi
6) Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan
7) Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2019
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	61,29%	70,97%	115,79%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	36,00%	37,50%	104,17%
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%	100%	100%

4	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,12%	0,56%	10,94%
5	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	58,00%	68,73%	118,52%
		Persentase Sanitasi Layak	66,90%	73,00%	109,12%
6	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,10	70,53	111,77%
7	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,35%	0,30%	85,71%
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,04%	0,02%	200%

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 7 sasaran yang didukung dengan 9 Indikator Kinerja Utama.

Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2019 sebesar 106,22 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

Berdasarakan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih konsisten dalam upaya pencapaian misi pertama ini.

	MISI 2 : ***MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)***

Untuk mencapai Misi 2 ***"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agrobisnis, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Investasi Industri, Kepariwisataan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Maritim)"*** pada tahun 2019 telah dilaksanakan 5 (lima) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis
2) Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan
3) Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah
4) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
5) Pengembangan Destinasi Wisata

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2019
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	100%	99,53%	99,53%
2	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	18,51%	30,99%	167,42%
3	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	92%	76,60%	30,55%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	113,37	117,33	103,49%
5	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,60%	0,37%	61,67%

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 5 sasaran dan 5 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2019 sebesar 92,53 %.

Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 85%.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pertanian ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan petani terhadap budidaya pertanian meningkat dari tahun ketahunnya, komoditi padi bila di usahakan dengan target panen 2 kali dalam satu tahun atau IP.200 sangat menunjang pendapatan petani sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai. Program yang mendukung untuk IP.200 ini dikenal dengan program Gertak Tanpa Dusta (Gerakan Tanam Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun).
2. Perubahan varietas benih jagung yang disesuaikan dengan spesifik lokasi sehingga hasil ubinan akhir dapat lebih tinggi dibanding varietas yang sebelumnya ditanam yaitu : Varietas SHS.4 menjadi Varietas Bisi.2 juga harga pasar terhadap komoditi jagung menguntungkan petani.
3. Dukungan kegiatan intensifikasi tanaman padi dan palawija merupakan program prioritas sehingga produksi yang ditargetkan dapat tercapai dan semua tidak terlepas dari dukungan dana APBD maupun APBN.
4. Persentase peningkatan tersedianya sarana prasarana dari target 14 % tercapai 91,73 % dengan total % capaian terhadap target 2019 sebesar 655 %, terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2018 sebesar 51,73 % hal dikarenakan adanya dukungan program pusat UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) melalui kegiatan pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) juga koordinasi yang baik terjalin antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ke Kementerian pertanian ataupun di Propinsi Jambi di bidang sarana prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
5. Untuk komoditi semangka dengan capaian 580 %, terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2018 sebanyak 951 ton dikarenakan minat petani terhadap komoditi semangka tinggi,permintaan pasar terhadap komoditi meningkat sehingga berdampak harga pasar tinggi pula, hal ini menguntungkan petani.

Terhadap komoditi yang tidak tercapai target di sebabkan oleh :

1. Komoditi Kedelai hanya mencapai target produksi 79 %, dan terjadi penurunan realisasi produktivitas dari tahun 2018 sebanyak 0,21 Ton/Ha, hal ini dikarenakan oleh Perilaku petani (Minat, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan) terhadap komoditi kedelai menurun/rendah, disaat panen harga panen kedelai rendah tidak mengutungkan petani nilai *Break Event Point* (BEP) terhadap harga ataupun hasil ≤ 1, sehingga petani memilih menyimpan hasil panen mereka di gudang.
2. Komoditi Nanas walaupun % capaian terhadap target 2019 mencapai 104 % namun terjadi penurunan ton dari realisasi tahun 2018 sebesar 35,50 ton, hal dikarenakan ada revisi target di rencana strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyesuaikan pada situasi, kondisi lapangan yang terjadi sehingga tidak terjadi mis data.
3. Produksi benih padi sebar label biru (*Extension Seed*) terjadi penurunan realisasi dari tahun 2018 sebanyak 98 ton dikarenakan adanya lokasi penangkar budidaya benih padi yang mengalami kekeringan bahkan ada yang sampai dalam kondisi fuso, sehingga ketersediaan bahan gabah untuk benih padi sebar label biru (*Extension Seed*)berkurang.

Solusi Terhadap permasalahan yang ada :

1. Program Gertak Tanpa Dusta (Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun) pada saat ini diterapkan tersebar di 6 Kecamatan wilayah Kabupaten seluas 1.500 Ha, lebih di intensifkan lagi guna meningkatkan pendatan petani untuk mewujudkan kesejahteraan petani, sehingga Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dapat berada pada posisi ≥ 100 %.
2. Terhadap komoditi kedelai yang ditanam di 2 (dua) Kecamatan Berbak dan Rantau Rasau agar di tumbuhkan kegiatan agribisnisnya terutama pada sub system agro supporting (Peran Penyuluhan Pertanian) dan Agro Marketing (Pemasaran) karena sampai saat ini petani mengeluh masalah pemasaran komoditi kedelai ini.
3. Terhadap komoditi nanas dan semangka yang merupakan produk unggulan daerah guna meningkatkan pendapatan petani kegiatan lebih difokuskan pada peningkatan nilai tambah, sehingga Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) terhadap komoditi hortikultura bias mencapai ≥ 100 %.

4. Terhadap masalah adanya lahan penangkar yang mengalami fuso peran penyuluh pertanian lebih diintensifkan petani diarahkan untuk ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan Jika dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian		
				Bertambah	Berkurang	Capaian (%)
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	• Produksi Padi (Ton)	82.555	118.507	20.524	0	143
	• Produksi Jagung (Ton)	9.551	16.696	4.076	0	174
	• Produksi Kedelai (Ton)	803	640	20	0	79
	• Produksi benih padi (Ton)	340	320	0	98	94
	• Produksi semangka (Ton)	395	2.291	951	0	580
	• Produksi Nanas (Ton)	12,30	12,80	0	35,50	104
Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	• Produktifitas Padi (Ton/Ha)	4,18	4,20	0,5	0	100
	• Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	6,17	6,98	0,18	0	113
	• Produktifitas Kedelai (Ton/Ha)	1,31	1,32	0	0,21	100
	• Produktifitas Semangka (Ton/Hektar)	5,13	13,55	8,37	0	264
	• Produktifitas Nenas (Kwintal/rumpun)	0,040	0,042	0,002	0	105
Meningkatnya prasarana pengolahan jalan usahatani	• Tersedianya prasarana pengolahan jalan usaha tani (Km)	14	91,73	51,73	0	655

	MISI 3 : ***MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK***

Untuk mencapai Misi 3 ***"Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan Penerapan Iptek"*** pada tahun 2019 telah dilaksanakan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat
2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
3) Menekan laju penduduk

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2019
1	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,12	63,92	101%
2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,06	87,76	141,41%
3	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77	0,72	106,94%

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 3 sasaran dan 3 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2019 sangat memuaskan sebesar 116,54 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas lebih dari 100 %.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang kesehatan ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Sasaran Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran dilihat dari perbandingan target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Penurunan angka kematian neonatal	Per 1000 KH	20/1000	21,63/1000	108,15
2	Penurunan angka kematian bayi	Per 1000 KH	20,5/1000	22,17/1000	108,14
3	Penurunan angka kematian balita	Per 1000 KH	21/1000	22,17/1000	108,14
4	Jumlah Kematian Ibu	Orang	4 Orang	2 Orang	50
5	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	65	54,05	83,15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator kinerja yang ada, 4 indikator telah mencapai target dan ada 1 indikator kinerja yang belum mencapai target (≤ 100%). Penjabaran dari masing-masing indikator sebagai berikut :

a) Jumlah kematian neonatal adalah kematian bayi dari usai 0 – 29 hari terdapat 11 kematian neonatal selama tahun 2019. Angka ini belum bisa dikatakan mewakili keseluruhan angka kematian neonatal, karena masih terdapat kelahiran yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2018 kematian neonatal diestimasikan 21,65 per 1000 kelahiran hidup dengan target 20,5 per 1000 kelahiran hidup. Perbandingan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan jika melihat angka rasio perkelahiran hidup yaitu sebesar 21,63 per 1000 kelahiran hidup dengan target 20 per 1000 kelahiran hidup (108,15%).

b) Jumlah kematian bayi tahun 2019 secara absolute sebanyak 13 orang dari jumlah bayi lahir hidup sebesar 3.652 jiwa. Kematian bayi yang dimaksud adalah kematian bayi dimulai dari usia 0 – 11 bulan. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 11 orang. Namun angka ini belum bisa dikatakan mewakili angka kematian bayi secara keseluruhan, karena biasanya kematian bayi tidak terlaporkan secara keseluruhan. Berdasarkan estimasi angka kematian bayi tahun 2019

sebesar 22,17/1000 kelahiran hidup. Apabila dilihat dari capaian kinerja sudah baik (108,14%), angka ini melebihi target yaitu 20,5/1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional (23/1000 H), AKB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah dibawah angka nasional.

c) Jumlah kematian balita tahun 2019 sebanyak 13 orang. Berdasarkan angka estimasi angka kematian balita sebesar 22,17/1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 108,14%, angka ini sudah melebihi target yaitu 21/1000 kelahiran hidup, apabila dibandingkan tahun 2018 sebanyak 11 orang (21,92/1000 kelahiran hidup) dengan capaian kinerja sebesar 98,08%.

d) Jumlah kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 2 orang, ini menunjukkan bahwa angka ini sudah berada dibawah target (4 orang) dengan capaian kinerja mencapai (50%), angka ini lebih kecil bila dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4 orang dari target 5 orang. Hal ini dikarenakan ibu hamil masih percaya melahirkan dengan dukun karena mereka beranggap melahirkan dengan dukun biayanya lebih murah dibandingkan dengan bidan, tingkat pengetahuan ibu hamil dan keluarga yang masih rendah sehingga tidak memahami bahaya komplikasi kehamilan dan persalinan yang di alami yang memperhambat proses merujuk ibu hamil serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan fasilitas anggaran jaminan persalinan yang ada di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur.

e) Cakupan persentase persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2019 sebesar 54,05% dengan capaian target pada angka 83,15%. Jika dilihat angka ini sudah mencapai target Dinas Kesehatan sebesar 65%.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung sasaran tersebut adalah :

a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak dengan kegiatan :
   - Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
   - Implementasi ANC (Ante Natal Care)
   - Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita
c. Program Jaminan Persalinan (Jampersal)

Dana yang disediakan untuk menyelesaikan sasaran ini untuk program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak sebesar Rp.240.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 224.125.000,- atau 93,22% sedangkan untuk program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita sebesar Rp.14.119.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.719.000,- atau 97,16%. Penyediaan dana Jamperasal Rp. 1.443.000.000 tetapi hanya terserap sebesar Rp 665.458.992 atau 46,12%.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran diatas adalah :

a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, terutama tenaga bidan dimana tenaga yang baru belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar.
b. Masih lemahnya pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan anak di puskemas sehingga data yang ada belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
c. Persalinan sebagian besar masih di lakukan di rumah baik baik di tolong dukun maupun tenaga kesehatan.
d. Tingkat pengetahuan ibu hamil dan keluarga yang masih rendah tentang kehamilan dan persalinan.
e. Tidak sampainya sosialisasi Jampersal kemasyarakat secara luas sehingga mengakibatkan rendahnya penggunaan alokasi dana Jampersal
f. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan lansia.

Upaya-upaya atau kegiatan yang akan diusulkan pada tahun 2019 dalam mengurangi permasalahan tersebut adalah :

a. Implementasi ANC (Ante Natal Care) terintegrasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan bidan dalam penanganan dan pemeriksaan pada ibu hamil.

b. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang berguna untuk memberikan pengetahuan pada remaja khusunya remaja putri dalam melatih diri menghadapi kehamilan pada saat yang akan datang.
c. Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) berguna untuk meningkatkan keterampilan nakes dalam mendeteksi perkembangan balita.
d. Pelatihan kelas ibu hamil dan balita, guna mempersiapkan kesehatan ibu hamil dalam menghadapi persalinan.
e. Sosialisasi Jampersal ketingkat desa/kelurahan

2. Sasaran meningkatnya status gizi masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Sasaran Status Gizi Masyarakat

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	%	0,46	0,80	173,91
2	Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita (wasting)	%	11,5	4,46	38,78
3	Prevalensi pendek dan sangat pendek pada anak balita (stunting)	%	31	7,24	23,35

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tiga indikator kinerja yang ada, ada satu indikator yang melebihi target dan ada dua indikator belum mencapai target (≥ 100%). Penjabaran dari masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita pada tahun 2019 sebesar 0,80% dengan capaian kinerja sebesar 173,91%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 88,88%.
2. Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita (wasting) pada tahun 2019 sebesar 4.46% dengan capaian kinerja sebesar 38,78%. Dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,40% dengan capaian kinerja sebesar 37% tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan dimana capaian realisasi ini karena banyak faktor yang harus diketahui. Faktor rendahnya kualitas

pangan yang dikonsumsi masyarakat, buruknya pola asuh dan sulitnya mencapai akses fasilitas kesehatan. Kurangnya peran serta masyarakat untuk aktif membawa anak balita ke posyandu, kurang tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang pentingnnya permasalahan gizi pada anak balita. faktor lain tidak adanya pencacatan dan pemantauan pada saat posyandu dan kunjungan ke Puskesmas terhadap tumbuh kembang anak sehingga bisa menjadikan angka capaian sasaran ini rendah.

3. Prevalensi pendek dan sangat pendek pada anak balita (stunting) pada tahun 2018 target stunting sebesar 33% dengan realisasi 23% dan angka capaian kinerja (69,69%). Tahun 2019 target stunting sebesar 31% dengan realisasi 7,24% dan angka capaian kinerja (23,35%). Terjadi penurunan capaian kinerja dimana pemahaman akan stunting atau tubuh dengan ukuran pendek merupakan masalah dalam tumbuh kembang anak. Stunting merupakan dampak yang terjadi akibat balita kekurangan gizi yang bahkan dimulai ketika anak masih didalam kandungan. Permasalahan stunting tidak hanya menjadi program nasional tetapi telah menjadi perhatian Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Dinas Kesehatan terutama bidang Kesehatan masyarakat dengan pertanggungjawaban seksi kesehatan keluarga dan Gizi. Perlunya pemberitahuan kepada seluruh petugas dan pelaksana kegiatan yang ada di Puskesmas dan posyandu untuk melakukan pencatatan dan pengukuruan pada setiap bayi yang ditimbang dan yang dibawa keposyandu setiap bulannya ataupun ke Puskesmas.

Beberapa Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung sasaran tersebut adalah :

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan :
  - Pemberian tambahan makanan dan vitamin
  - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
  - Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan Posyandu

Dana yang ditargetkan untuk menyelesaikan sasaran ini sebesar Rp. 563.315.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 509.272.496,- atau 90%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan dan tumbuh kembang serta manfaat makanan bergizi bagi keluarganya, dan perlu penguatan peran petugas puskesmas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi status gizi masyarakat sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kesehatan tahun 2019 tetap akan melaksanakan kegiatan :

- Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

3. Sasaran Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Sasaran Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular Tahun 2019

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Cakupan penemuan dan penanganan TB Paru BTA+	%	82	63,07	76,91
2	Prevalensi penyakit kusta per 10000 PDDK	Per 10000 Pddk	2	1,6	80
3	Cakupan Desa/kel Uci	%	96,2	97,6	101,66
4	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	%	23,6	25,95	109,95
5	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia +18 tahun	%	11	32,50	295,45
6	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	%	18	2,1	11,66
7	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	%	100	100	100
8	Angka kesembuhan TB paru BTA+	%	96	97,6	101,66

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 indikator kinerja yang ada, ke 5 indikator telah mencapai target (≥ 100%). Sebagian Indikator sasaran ini ada pada program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dengan dana sebesar Rp 545.087.000 dan realisasi Rp 495.508.850 (90,90%). Sasaran dan indikator lain berada pada program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dengan dana Rp 230.009.000,- dan

realisasi Rp 195.474.525 (84,99%). Penjelasan masing – masing indikator sebagai berikut :

1. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA+ pada tahun 2019 sebesar 63,07%, dengan target 82%, dan capaian kinerja 76,91%. Apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 58,3%, angka capaian kinerja sebesar 72,87%. Tercapainya angka ini dikarenakan kepatuhan pasien TBC untuk minum obat selama 6 bulan dan petugas kesehatan rajin memberikan penyuluhan tentang TBC kepada masyarakat karena penyakit ini dapat menular.
2. Prevalensi penyakit kusta pada tahun 2019 sebesar 1,6 per 10.000 penduduk dengan angka capaian kinerja sebesar 80%, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2 per 10.000 penduduk dengan angka capaian kinerja sebesar 125%.
3. Persentase desa UCI pada tahun 2019 sebesar 93,5 % dengan target 96,2% dengan capaian kinerja 97,39%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 92,5 % dengan target 96% dengan capaian kinerja 96,35%.
4. Prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 sebesar 25,95% dari target 23,6% dengan capaian kinerja sebesar 109,95%. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 24,96% dari target 23,90% dengan capaian kinerja sebesar 95,75%.
5. Prevalensi obesitas penduduk >18 tahun pada target tahun 2019 menetapkan target 11% dengan capaian 32,50% dan capaian kinerja 295,45%. Dibandingkan tahun 2018 target sebesar 11,3% dan realisasi sebesar 32,29% dengan capaian kinerja 34,99%.
6. Prevalensi merokok Penduduk usia <18 tahun 2019 dengan target 18%, capaian 2,1% dengan capaian kinerja 11,66%. Dibandingkan tahun 2018 target sebesar 20% dengan realisasi 49% dengan capaian kinerja 40,81%. Masih sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya rokok menjadi kendala bagi penerapan program ini dimasyarakat. Serta perlunya upaya bersama dalam mensosialisasikan bahaya merokok bagi kesehatan. Angka ini lebih tinggi dari target Nasional yaitu 5,9%.

7. Cakupan penemuan dan penanganan DBD pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan merebaknya kasus DBD adalah pemberdayaan masyarakat melalui Gertak PSN, pemberantasan vektor dan KIE yang terus menerus dilakukan oleh jajaran kesehatan didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan.
8. Angka kesembuhan TB paru dan BTA+ pada tahun 2019 target sebesar 96% dengan realisasi 97,60% serta capaian kinerja sebesar 101,66%. Capaian ini lebih berhasil Jika dibandingkan dengan tahun 2018 target sebesar 95% dengan realisasi 91,5% serta capaian kinerja sebesar 96,80%. Hal ini didukung oleh kepatuhan pasien untuk meminum obat sampai sembuh. Angka ini lebih rendah dari target Nasional yaitu 84%.

Keberhasilan dari 8 sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program:

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan :
   - Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
   - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
   - Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah
   - Pencegahan dan penularan penyakit menular endemic/epidemic

b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
   - Pengendalian penyakit tidak menular
   - Pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA
   - Pembentukan , pembinaan dan evaluasi Posbindu

4. Sasaran peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Indikator keberhasilan sasaran dan target beserta realisasinya sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	43	44,97	104,5
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	23,5	9,10	38,72

1. Penjelasan dari tabel diatas menunjukan bahwa telah tercapainya pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam melayani dan menjangkau kebutuhan masyarakat miskin terhadap kesehatan dan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini.. Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014 target sebesar 43% dan capaian 44,97% (104,5%). Sama dengan tahun 2018 sebesar 55% dengan capaian kinerja 137,5%. Faktor yang dirasa masih menjadi kendala masih terdapat kurangnya pengetahuan tentang jaminan kesehatan Untuk mengatasi hal tersebut tentunya perlu diberikan sosialisasi kepada penduduk miskin bagaimana pemanfaatan jaminan kesehatan.
2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin target pada tahun 2019 sebesar 23,5% dengan realisasi 9,10% serta capaian kinerja 38,72%, jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 23% dengan realisasi 12,41% serta capaian kinerja 53,95%, angka ini mengalami penurunan. Penurunan jumlah masyarakaat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan karena belum semua informasi yang tersampai kepada masyarakat tentang pengguna dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Beberapa program yang ada dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu :
   a. Program Upaya Kesehatan masyarakat dengan besaran anggaran Rp 8.137.976.000 realisasi Rp 7.946.029.008 (97,64%). Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :
      - Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
      - Peningkatan pelayanan dan penanggulangan kesehatan
      - Penyediaan biaya operasional dam pemeliharaan puskesmas
      - Pembinaan Usaha Kesehatan sekolah
      - Penyediaan Biaya Operasional Instalasi Farmasi
      - Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
   b. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan besar anggaran Rp. 187.560.000 realisasi Rp 187.500.000 (100%). Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini :
      - Pelayanan kesehatan katarak

- Pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK)

5. Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Persentase rumah tangga PHBS	%	56	59,24	105,78
2	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	%	58	68,73	118,50
3	Cakupan desa terhadap sanitasi yang layak	%	32	71,58	223,68

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 indikator kinerja yang ada semua indikator melampui target.

Pada sasaran ini dapat dijabarkan indikator pencapaian sasaran yaitu :

1. Persentase rumah tangga PHBS pada tahun 2019 sebesar 56% realisasi 59,24% dan capaian kinerja 105,78%. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 55% realisasi 60% dan capaian kinerja 126,31%. Angka ini masih terlihat sama disebabkan karena telah dilakukan penilaian kepada masyarakat tentang prilaku hidup bersih sehat dilingkungan rumah dan ditatanan sekolah, maka harus dilakukan terus penyuluhan PHBS ditatanan sekolah dan rumah tangga.
2. Persentase rumah tangga dengan layanan air bersih target tahun 2019 sebesar 58% dengan realisasi 68,73% serta capaian kinerja sebesar 118,50% terjadi peningkatan kinerja jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 57% dengan realisasi 62% serta capaian kinerja sebesar 126,31%. Penyebab terjadinya peningkatan angka capaian dikarenakan adanya perubahan defenisi operasional tentang indikator air bersih. Dimana Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar masih menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih. Kondisi daerah pada dataran rendah dan berawa menyebabkan kesulitan sumber air bersih.

3. Cakupan desa terhadap sanitasi layak pada tahun 2019 target sebanyak 32% dengan realiasi 71,58% dan capaian kinerja sebesar 223,68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 target sebanyak 30% dengan realiasi 11,82% dan capaian kinerja sebesar 39,41%. Angka ini mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya perubahan defenisi operasional tentang akses sanitasi layak. Selain kondisi topografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada pada dataran rendah sehingga berada pada daerah rawa dan pasang surut, sehingga mengalami kesulitan dalam pengolahan sanitasi yang layak.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini yaitu :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp 155.959.000 dan realisasi Rp 152.541.250 (97,8%). Beberapa Kegiatan :
   - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
   - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
   - Pembinaan desa siaga.
2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan dana sebesar Rp 336.185.000 dan realisasi Rp 319.918.000 (95%). Kegiatan yang ada dalam mencapai sasaaran yaitu :
   - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS)
   - Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
   - Sosialisasi kebijakan kesehatan lingkungan

Sasaran strategis yang ketiga yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2019 tercapai 106,94% dimana target pada tahun 2019 sebesar 0,77% terealisasi sebesar 0,72%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,5% selama tahun 2019.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang Pengendalian Penduduk ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

a. Penyuluhan tentang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di kampung KB setiap kecamatan rutin

dilaksanakan melalui kegiatan Pergerakan Kampung KB yang bersumber dari dana BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana).

b. Pelayanan KB lebih mendorong pada pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti MOP (Metode Operasi Pria), MOW (Metode Operasi Wanita), Implan dan IUD sehingga kemungkinan putus pakai atau drop out pemakaian KB dapat ditekan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 dalam penyuluhan dan pergerakan Keluarga Berencana ini, antara lain :

a. Pembentukan dan pembinaan kelompok GenRe (Generasi Terencana) untuk persiapan generasi keluarga yang terencana dan sejahtera masih terkendala dengan dana yang sangat terbatas, padahal kegiatan ini sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda sebelum membentuk sebuah keluarga, selain itu juga dapat mencegah stunting karena mereka telah memahami arti 8 (delapan) fungsi keluarga.
b. Pelayanan KB masih sangat terbatas, terkait dengan keterbatasan dana sehingga penjangkauan desa pelosok masih belum optimal.
c. Pembentukan dan pembinaan kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) masih belum optimal.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan segala keterbatasannya, memanfaatkan kegiatan momentum yang diadakan oleh PKK, TNI, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dll dengan mengadakan kegiatan bhakti sosial pelayanan KB secara gratis, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB sehingga menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019.

Dukungan dana operasional KB (BOKB) sangat berpengaruh terhadap kegiatan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain

dipergunakan untuk pergerakan Kampung KB dimanfaatkan dalam pelaksanaannya dimodifikasi sedemikian rupa dengan penyuluhan dan pelayanan KB sehingga kegiatan menjadi lebih variatif.

Selain itu UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga juga menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan keluarga. Keluarga yang sejahtera memberikan keinginan dan partisipasi anggota keluarga untuk berperan aktif dalam kegiatan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), sehingga kegiatan jambore KB, pasangan KB lestari terus dilombakan setiap tahun hingga ke tingkat nasional.

	MISI 4 : *MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF*

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

1) Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya
2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2019
1.	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%	100%	100,00%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	93,75	-	-

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 2 sasaran dengan 2 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih

angka jauh dari target yang ditetapkan karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2019 meraih angka sebesar 50 %, khususnya pada indikator Indeks Kebebasan Sipil dengan capaian target 0%, ini dikarenakan Indeks Kebebasan Sipil yang merupakan target dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan indikator kinerja Provinsi Jambi yang mana cara perhitungannya di hitung berdasarkan secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

MISI 5 : ***MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS***

Untuk mencapai Misi 5 ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis"*** pada tahun 2019 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

1) Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa
2) Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan
3) Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government
4) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2019
1.	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100%
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	89,04%	72,86%	81,83%
2	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	315.000	671.610	213,21%
3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	86,00%	74,00%	86,05%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	45%	61%	135,56%

4	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP*	100%
		Predikat EPPD	Tinggi	Sangat * Tinggi	100%
		Predikat SAKIP	B	CC*	90%

*Sumber : * Data Tahun 2018*

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal capaian kinerja tahun 2019 pada Misi 5 mencapai 113,33 % atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedangakan rata-rata capaian kinerja misi kelima tahun 2019 sebesar 113,33 % dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 213,21% pada Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pemerintahan ini dikarenakan adanya goodwill dari kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelayan bagi masyarkatnya selaras dengan visi – misi Bupati "MERAKYAT"

C. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.196.852.312.992,03 dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.195.803.242.812,10 atau terealisasi sebesar 99,91 %, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	54.370.242.233,45	53.974.771.833,20	99,27
2	Pendapatan Dana Perimbangan	967.523.345.242,31	959.088.814.692,00	99,13
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	174.958.725.516,27	182.739.656.286,90	104,45
	Total	**1.196.852.312.992,03**	**1.195.803.242.812,10**	**99,91**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2019.

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	17.913.350.000,00	16.647.635.508,94	92,93
2	Retribusi Daerah	1.817.020.000,00	1.586.254.225,29	87,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	6.600.000.000,00	6.644.336.146,09	100,67
4	Lain – Lain PAD yang sah	28.039.872.233,45	29.096.545.952,88	103,77
J u m l a h		**54.370.242.233,45**	**53.974.771.833,20**	**99,27**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2019 penerimaan yang ditargetkan sebesar 54.370.242.233,45 dari target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini disumbang oleh seluruh pendapatan sebesar 54.370.242.233,45 atau 99,27 %. realisasi pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	191.614.825.242,31	207.960.691.035,00	108,53
2	Dana Alokasi Umum	564.422.212.000,00	564.422.212.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	211.486.308.000,00	186.705.911.657,00	88,28
J u m l a h		**967.523.345.242,31**	**959.088.814.692,00**	**99,13**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2019 mencapai target pendapatan yang ditetapkan sebesar 967.523.345.242,31. Pendapatan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi 959.088.814.692,00 atau 99,13 %

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah	0,00	0,00	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	44.641.576.516,27	53.524.507.286,90	119,90
3	Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus (DPDF)	114.390.649.000,00	113.288.649.000,00	99,04
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	15.926.500.000,00	15.926.500.000,00	100,00
J u m l a h		**174.958.725.516,27**	**182.739.656.286,90**	**104,45**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	578.065.062.233,38	556.687.238.583,00	96,30
2	Belanja Langsung	693.969.479.670,19	632.167.845.147,64	91,09
	Total	**1.272.034.541.903,57**	**1.188.855.083.730,64**	**93,46**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2019 belanja tidak langsung hanya sebesar 96,30 % dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2016-2021 kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Total realisasi belanja sebesar Rp. 1.272.034.541.903,57 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.188.855.083.730,64 atau terealisasi sebesar 93,46%, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 578.065.062.233,38 atau 96,30 % dan belanja langsung sebesar Rp. 693.969.479.670,19 atau 91,09 %.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan

penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**77.182.228.911,54**	**77.182.228.911,54**
	- SiLPA	77.182.228.911,54	77.182.228.911,54
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	- Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00
	- Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	- Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3	**Pembiayaan Netto**	**75.182.228.911,54**	**75.182.228.911,54**

** Data Sementara(unaudit)*
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2019, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2019, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 77.182.228.911,54 terealisasi sebesar Rp. 77.182.228.911,54 atau 100 %, sedangkan sisi pengeluaran pembiayan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 100% sehingga pembiayaan netto tahun 2019 sama dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 75.182.228.911,54 terealisasi sebesar Rp. 75.182.228.911,54 atau 100 %.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) tahun 2016–2021, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2019 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders,* antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perubahan paradigma aparatur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd.

H. ROMI HARIYANTO, SE.

LAMPIRAN I

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 80);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berisi

Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 FEBRUARI 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR..8..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKTOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				Kondisi Awal 2018	2019		
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)							
MISI 1 : Meningkatkan pembangunan insfrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan							
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	(jumlah desa/kel yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi mantap/jumlah desa/kel) x 100%	-	61,29%	Primer	DINAS PUPR
	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	(Luas Sawah yang terairi oleh jaringan irigasi yang dibangun/dipelihara dibagi luas Sawah keseluruhan) x 100%	-	36,00%	Primer	DINAS PUPR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				Kondisi Awal 2018	2019		
	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Cukup Jelas	60,9	63,1	Primer	DINAS LH
MISI 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan							
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis	NTUP	Indeks yang diterima petani (It)/Indeks yang	99,8	100	Primer	DINAS TPH, DINAS BUNNAK,
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Rata-rata Jumlah ketersediaan Pangan setahun/Jumlah penduduk x 100%	78,00	80,00	Primer	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Indeks yang diterima nelayan (It)/Indeks yang dibayar nelayan (Ib) x 100%	-	113,37	Primer	DINAS PERIKANAN
MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK							
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Cukup Jelas	62,52	63,12	Primer	DINAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Cukup Jelas	0,78	0,77	Primer	DINAS PPKB
MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif							
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	Cukup Jelas	90,55	93.75	Primer	BADAN KESBANGPOL
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokrasi							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				Kondisi Awal 2018	2019		
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup Jelas	B	A	Primer	DINAS KESEHATAN DISDUKCAPIL, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DPMPTSP, SETDA
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	B	B	Primer	SETDA, INSPEKTORAT
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Primer	BAKEUDA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Sabak, Oktober 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Tahun : 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	61,29%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	36,00%
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,12%
5	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	58,00%
		Persentase Sanitasi Layak	66,90%
6	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,1
7	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,35
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,04
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	100
9	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	18,51%
10	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	92%
11	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	113,37
12	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,60
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,12
14	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,06
15	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
16	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	93,75
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
18	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	89,04%
19	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	315.000
20	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	86,00%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	45%
21	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	B
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi

Jumlah APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp. 1.272.034.541.903,57 yang terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 578.065.062.233,38 dan,

2) Belanja Langsung sebesar Rp. 693.969.479.670,19

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN TAHUN 2019

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Tahun : 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			CAPAIAN TARGET TAHUN 2018
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET	
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	61,29%	70,97%	115,79%	-
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	36,00%	37,50%	104,17%	-
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%	100%	100%	100%
4	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,12%	0,56%	10,94%	2,88%
5	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	58,00%	68,74%	118,52%	72,00%
		Persentase Sanitasi Layak	66,90%	73,00%	109,12%	44,19%
6	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,10	70,53	111,77%	69,08%
7	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,35%	0,30%	85,71%	116,67%
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,04%	0,02%	200,00%	0,087%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)						
8	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	100%	99,53%	99,53%	99,92%
9	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	18,51%	30,99%	167,42%	30,54%
10	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	92%	76,60%	30,55%	10,69%
11	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	113,37	117,33	103,49%	113,20%
12	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,60%	0,37%	61,67%	0,37%
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK						
13	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,12	63,92	101%	63,32
14	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,06	87,76	141,41%	87,30%
15	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77	0,72	106,94%	0,75%
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF						
16	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%	100%	100,00%	100,00%
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	93,75	-	-	-
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS						
18	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100%	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	89,04%	72,86%	81,83%	44,60%
19	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	315.000	671.610	213,21%	760.847
20	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	86,00%	74,00%	86,05%	74,19%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	45%	61%	135,56%	27,27%
21	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	B	CC	90%	CC
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			CAPAIAN TARGET TAHUN 2018
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET	

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Tahun : 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	61,29%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	36,00%
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,12%
5	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	58,00%
		Persentase Sanitasi Layak	66,90%
6	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,1
7	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,35
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,04
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	100
9	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	18,51%
10	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	92%
11	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	113,37
12	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,60
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,12
14	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,06
15	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
16	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	93,75
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
18	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	89,04%
19	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	315.000
20	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	86,00%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	45%
21	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	B
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi

Jumlah APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp. 1.272.034.541.903,57 yang terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 578.065.062.233,38 dan,

2) Belanja Langsung sebesar Rp. 693.969.479.670,19

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO